

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Pemerintah desa berperan krusial sebagai mobilisator dalam pengembangan objek wisata dengan cara menggerakkan dan memberdayakan masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam setiap aspek pengelolaan pariwisata. Sebagai penggerak utama, pemerintah desa bertanggung jawab dalam pembentukan dan pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), memberikan pelatihan dan pendidikan, mendukung pengembangan UMKM lokal, serta menginisiasi kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan dan kelestarian objek wisata. Selain itu, pemerintah desa juga memfasilitasi pembangunan infrastruktur.

Dalam mengembangkan objek wisata pantai Meko, pemerintah desa Pledo menghadapi beberapa kendala. kendala-kendala yang dihadapi baik dari segi pendanaan, SDM hingga alam. beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Pledo yaitu sebagai berikut :

1. Dana yang minim.

Pemerintah desa dalam melakukan pengembangan wisata pantai meko dihadapkan pada masalah dana/anggaran desa yang minim. anggaran desa yang minim ini menjadi suatu persoalan bagi pemerintah desa. pemerintah harus memikirkan berapa besar alokasi dana yang dibutuhkan dalam pengembangan pantai Meko dan kemampuan dana yang dimiliki. akibat dari kekurangan dana ini, pemerintah dan pengelola pantai tidak dapat membangun lebih banyak lopo dan tempat berteduh lainnya bagi pengunjung sehingga pengunjung merasa tidak puas dengan fasilitas dan pelayanan di lokasi pantai.

Minimnya dana yang dimiliki oleh pemerintah Desa ini ditandai dengan alokasi anggaran bagi pengembangan wisata yang hanya berjumlah Rp.3.000.000 dana yang ditetapkan ini tidak berubah dari tahun anggaran 2019- tahun anggaran 2022. Untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2024 tidak dilakukan alokasi anggaran bagi pengembangan wisata pantai Mekko. hal ini dikarenakan jumlah APBDes yang sangat minim dan kurangnya kemampuan pengelolaan anggaran dari pihak Pengelola pantai.

2. SDM yang kurang

Salah satu hal yang menjadi masalah paling krusial ialah masalah SDM di sekitar lokasi pantai Mekko. Pemerintah memberikan hak pengelolaan bagi masyarakat POKDARWIS untuk mengelola anggaran pengembangan pantai dan menjaga fasilitas yang pantai, baik dari segi kebersihan hingga semua fasilitas umum lainnya yang terdapat di lokasi pantai. Hal yang ditemukan yaitu pengelola pantai belum mampu mengelola dana dan fasilitas di sekitar lokasi pantai dengan baik. Hal ini berdampak pada kekosongan anggaran pengembangan wisata pada tahun 2023 dan 2024 sebagai akibat dari ketidakmampuan dan tidak adanya pertanggungjawaban hasil pengelolaan anggaran

Kurangnya perhatian masyarakat POKDARWIS Sebagai pengelola pantai terhadap kebersihan di sekitar pantai, terutamanya fasilitas MCK yang tidak terawat. Lokasi MCK seringkali terlihat kumuh dan banyak ditumbuhi tumbuhan liar yang semakin memperparah. ketidakpekaan pengelola dan masyarakat terhadap kebersihan dan perawatan fasilitas di lokasi pantai menjadi salah satu permasalahan yang sangat krusial dan perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah. selain lokasi MCK, beberapa titik di lokasi pantai seringkali dibiarkan dengan kondisi yang tidak baik.

3. Pengelolaan fasilitas yang masih kurang memadai.

Masalah lain yang dihadapi yaitu fasilitas yang belum lengkap seperti akses air bersih yang masih sangat minim dan terbatas. masalah air bersih ini sendiri sudah ditangani dengan penyediaan air dengan cara disuling akan tetapi masih belum dikelola dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat.

6.2. Saran

Dalam melakukan sebuah kegiatan tentunya terdapat berbagai kendala yang dapat ditemui. Begitupun dan rencana pengembangan objek wisata Pantai Mekko. seperti yang telah disebutkan diatas terdapat beberapa kendala yaitu dana yang minim, sumber daya manusia yang masih rendah dan fasilitas yang masih kurang. berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa *alternative* solusi sebagai berikut:

1. Kerja Sama dengan pemerintah daerah

Pemerintah desa memiliki APBD Desanya tersendiri. Namun dalam implementasinya dana tersebut masih belum dapat mencukupi kebutuhan belanja daerah setiap tahunnya. salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini khusus pada pengembangan objek wisata Pantai Mekko, dapat dilakukan bersama Dinas Pariwisata. dengan adanya kerja sama dengan dinas pariwisata, pengembangan pantai wisata Mekko akan tetap berjalan.

Anggaran dinas Pariwisata dapat digunakan khusus untuk membangun fasilitas-fasilitas yang masih kurang di lokasi pantai Mekko. melalui Dinas Pariwisata juga promosi wisata Pantai Mekko akan semakin meningkat dan dapat menjangkau jumlah pasar yang lebih luas lagi.

Dengan adanya kerja sama dengan pemerintah daerah tentunya dapat membantu dalam mengatasi permasalahan seperti aspal jalan masuk yang masih rusak, listrik yang minim dan jaringan internet yang belum stabil dan Lopo yang masih terbatas. Selain itu, dana yang ada dapat digunakan sebagai sumber untuk melakukan pemeliharaan fasilitas di pantai.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa Pantai Wisata Mekko sendiri pernah menyandang juara 2 dalam penghargaan API pada tahun 2020. Hal ini menjadi poin plus untuk dapat dilakukan kerja sama lebih lanjut bersama pemerintah daerah kabupaten hingga provinsi untuk terus dikembangkan. Pantai Mekko yang memiliki daya tarik pasir putihnya ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk dikembangkan.

2. Memberikan pelatihan bagi masyarakat

Pelatihan yang dimaksud disini ialah dikhususkan bagi pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang dipercayakan untuk mengelola pantai seperti POKDARWIS dan Bangkit Muda-Mudi Mekko. Pelatihan dilakukan dengan tujuan agar pengelola semakin memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengelola pantai dan bagaimana cara agar tetap menjaga kelestarian dan keberlangsungan wisata pantai. Kelompok ini diharapkan agar mampu mengelola sumber dana yang diberikan, merawat fasilitas yang ada dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya setiap tutup buku di akhir tahun. Selain itu peningkatan sumberdaya ini diharapkan semakin memajukan wisata pantai Mekko ke arah yang lebih baik. Melalui Pelatihan ini juga masyarakat diharapkan mampu untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Sebagai contoh dapat dikembangkannya wisata kuliner berdampingan dengan ekowisata bahari, maupun kerajinan tangan yang dapat dijadikan sebagai souvenir bagi wisatawan.

Pelatihan ini juga diwajibkan bagi pemerintah desa sebagai pengawas dan pengarah bagi pelaksana/pgelola pantai. pemerintah desa diharapkan untuk bisa semakin memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam pengembangan objek wisata Mekko dan bagaimana menerima laporan pertanggungjawaban dari pengelola pantai Mekko.

3. Meningkatkan pendampingan bagi masyarakat

Selain melakukan kerja sama, perlu adanya pendampingan secara continue dengan masyarakat. masyarakat yang semakin didampaingi berpeluang untuk semakin paham dalam mengelola pantai sehingga kedepan pengelolaan pantai ini dapat dijalankan dengan lancar dan semakin meningkatkan kinerja dan daya tarik bagi wisatawan.

Pendampingan ini menjadi hal yang penting agar masyarakat bisa paham bagaimana alur untuk mengelola pantai. bukan saja menjaga kebersihan dan fasilitas di pantai, akan tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan manajemen anggaran dan menggali potensi SDM yang ada.

4. Terlibat dalam penertiban masyarakat

Tempat wisata yang baik bukan hanya dilihat dari keindahan alamnya saja akan tetapi SDMnya. SDM yang dimaksud disini ialah kesadran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. jika masyarakat berbondong-bondong untuk menjaga keamanan, maka dapat dipastikan bahwa akan semakin menarik minat wisatawan untuk berkunjung. tujuan berwisata ialah untuk bersenang-senang dan melepas penat, sehingga sangat disayangkan apabila dalam perjalanan wisata ditemukan kejadian yang tidak menyenangkan.